

# Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Nagari Koto Taratak Kabupaten Pesisir Selatan

Marni Yuniza<sup>1</sup>, Hasbullah Malau<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi Masyarakat dalam pengambilan keputusan pada musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari Koto Taratak Kabupaten Pesisir Selatan. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu belum optimalnya partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang dan tidak efektifnya proses diskusi selama rapat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi Masyarakat dalam pengambilan keputusan pada musrenbang di Nagari Koto Taratak terdiri atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung partisipasi Masyarakat dalam musrenbang yaitu (a) Harapan dan keinginan dari masyarakat, (b) Kesadaran diri Masyarakat, (c) Dukungan dari Pemerintah Nagari. Sedangkan faktor penghambat partisipasi Masyarakat terdiri atas : (a) Pekerjaan atau ekonomi, (b) tingkat pendidikan masyarakat yang rendah.

**Kata Kunci:** Faktor, Partisipasi Masyarakat, Pengambilan Keputusan, Musyawarah

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.203>

\*Correspondence: Marni Yuniza

Email: [marniyuniza@gmail.com](mailto:marniyuniza@gmail.com).

Received: 12-01-2025

Accepted: 17-02-2025

Published: 03-03-2024

**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This research aims to analyze the factors that influence community participation in decision making at development planning meetings in Nagari Koto Taratak, Pesisir Selatan Regency. The background to this research is the lack of optimal community participation in the implementation of Musrenbang and the ineffectiveness of the discussion process during meetings. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. The research results show that the factors that influence community participation in decision making at the musrenbang in Nagari Koto Taratak consist of supporting factors and inhibiting factors. The supporting factors for community participation in musrenbang are (a) hopes and desires of the community, (b) community self-awareness, (c) support from the Nagari government. Meanwhile, factors inhibiting community participation consist of: (a) work or the economy, (b) low level of community education

**Key words:** Factors; Community Participation, Decision Making, Deliberations

## Pendahuluan

Partisipasi Masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan adalah suatu keadaan dimana Masyarakat ikutserta dalam proses penyusunan, pembuatan dan pengambilan keputusan pembangunan. Keterlibatan Masyarakat dalam pengambilan keputusan diharapkan dapat menghasilkan alternatif dan opsi pembangunan yang luas dan berorientasi pada kepentingan Masyarakat. Seiring berjalannya waktu fokus pembangunan mulai diperhatikan baik oleh pemerintah maupun Masyarakat, hal ini tercermin dari berubahnya pergerakan pembangunan yang awalnya bergerak dari atas ke bawah (*top-down*) menjadi perencanaan pembangunan yang bergerak dari bawah ke atas (*bottom-up*) ((Tjilen & Moento, 2023). Hal ini mengartikan bahwa perencanaan pembangunan dibangun atas usulan dan kepentingan Masyarakat lalu ditanggapi oleh pemerintah. Semakin besar partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan maka semakin besar pula peluang keberhasilan program pembangunan tersebut. Oleh sebab itu, Masyarakat perlu meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan pada musyawarah perencanaan pembangunan agar program yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Masyarakat.

Partisipasi Masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat dilihat pada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, karena musrenbang merupakan forum utama yang disediakan oleh Masyarakat sebagai wadah untuk menampung suara dan kritikan Masyarakat. Musyawarah perencanaan pembangunan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 21 tahun (2020) pasal 1 ayat (11) adalah musyawarah antara BPD, pemerintah desa, beserta unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa. Musrenbang menjadi tempat yang paling tepat dan terbuka bagi Masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, usulan dan keinginan pada pemerintah. Kehadiran dan partisipasi Masyarakat dalam musrenbang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan hasil akhir perencanaan pembangunan yang mampu mencapai target kebutuhan dan kepentingan Masyarakat.

Musyawarah perencanaan pembangunan merupakan agenda tetap yang dilakukan oleh pemerintah satu kali dalam satu tahun. Menurut (Setiawan, 2022) musyawarah perencanaan pembangunan adalah ruang partisipasi Masyarakat Indonesia yang didedikasikan dalam proses perencanaan pembangunan. Sedangkan menurut (Poespitoahadi & Ega Tree, 2019) musrenbang adalah kegiatan yang diadakan untuk membahas dan menyetujui rencana kerja pemerintah (RKP) dan menjadi agenda tahunan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pelaksanaan musrenbang bertujuan untuk memfasilitasi aspirasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Nagari Koto Taratak merupakan sebuah Nagari yang berada di Kecamatan sutera Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki 2278 penduduk yang terdiri atas 1127 penduduk laki-laki dan 1151 penduduk Perempuan (BPS, 2023). Musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari Koto Taratak yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2024 telah dihadiri oleh 54 orang peserta yang terdiri atas 10 orang staff nagari, 5 orang BAMUS, dan 5 orang tim pendamping desa. Adapun jumlah unsur Masyarakat yang hadir yaitu sebanyak 34 orang yang terdiri atas kelompok Masyarakat dari unsur Pendidikan, unsur Kesehatan, pemuda/pemudi, kader posyandu, petani, dan tim PKK. Jumlah ini menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi Masyarakat dalam pengambilan keputusan pada musyawarah perencanaan pembangunan karena dari 100 undangan yang disebar kepada Masyarakat hanya 34 orang yang hadir. Dengan adanya permasalahan tersebut maka artikel ini akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi Masyarakat di Nagari Koto Taratak khususnya dalam msuyawarah perencanaan pembangunan.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut (Yusuf, 2014) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif seperti kalimat tertulis atau tidak tertulis yang diperoleh dari subjek dan pengamatan fenomena yang terjadi. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi, observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala yang muncul pada objek penelitian, sedangkan wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan narasumber penelitian untuk mendapat jawaban dan pemecahan masalah (Waris, 2022). Sedangkan Teknik pengolahan data menggunakan Teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan lalu terakhir menggunakan uji keabsahan data dengan Teknik triangulasi sumber yang membandingkan data yang diperoleh dari beberapa informan dan sumber data lainnya (Sugiyono, 2019).

### **Hasil dan Pembahasan**

Partisipasi Masyarakat menurut (Suaib, 2023) adalah kekikutsertaan Masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang dimiliki Masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang beberapa alternatif solusi dalam menangani masalah, menyelesaikan masalah dan keikutsertaan Masyarakat dalam melakukan evaluasi terhadap perubahan yang terjadi. Partisipasi Masyarakat menjadi salah satu hal penting yang harus ditingkatkan agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat berorientasi pada kepentingan yang dibutuhkan oleh Masyarakat. (Handini et al., 2018) mendefinisikan partisipasi Masyarakat sebagai pola keterlibatan Masyarakat secara aktif dan sukarela yang

didorong oleh kesadaran diri yang datang dari dalam diri sendiri (*instrinsik*) maupun dorongan dari luar (*ekstrinsik*) terhadap jalannya kegiatan berupa pengambilan keputusan pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan mampu memanfaatkan hasil yang diperoleh. Di Nagari Koto Taratak partisipasi Masyarakat dalam pengambilan keputusan pada musyawarah perencanaan pembangunan masih belum optimal dan cenderung rendah.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, tingkat partisipasi Masyarakat dalam pengambilan keputusan pada musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari Koto Taratak berada pada tingkat adanya partisipasi (*tokenism*) yang disebut juga sebagai bentuk partisipasi yang tingkatannya masih lemah. Berdasarkan teori *Ladder of Participation* (tangga partisipasi) yang dikemukakan oleh Sherry Arnstein dalam (Muluk & M.R Khoirul, 2007) teori ini mengkategorikan partisipasi sebagai kekuasaan Masyarakat dalam mempengaruhi perubahan dalam pembuatan kebijakan. Teori ini membagi tiga tingkatan partisipasi yaitu *non participation*, *tokenism*, dan *citizen control*. Masing-masing tingkatan memiliki anak tangga tersendiri yang menggambarkan tingkatan partisipasi dalam derajat tersebut. Tingkatan terendah dinamakan *non participation* yaitu menggambarkan tidak adanya partisipasi Masyarakat dalam tingkatan tersebut karena seluruh keputusan berada ditangan penguasa dan Masyarakat hanya dilibatkan sebagai bentuk formalitas. Tingkatan kedua dinamakan *tokenism* yaitu menunjukkan tanda adanya keterlibatan Masyarakat meskipun belum mampu mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Sedangkan tingkatan terakhir dinamakan *citizen control* yaitu Masyarakat memiliki kendali penuh atas pengambilan keputusan.

Partisipasi Masyarakat yang menunjukkan tingkat *tokenism* di Nagari Koto Taratak berada pada anak tangga pemberian informasi, konsultasi dan penentrman. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi Masyarakat masih berada ditingkat yang masih lemah karena belum mampu mengendalikan kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Anak tangga pemberian informasi ditandai dengan adanya komunikasi satu arah dari pihak yang berwenang kepada Masyarakat seperti memberikan surat undangan pada peserta musrenbang. Sedangkan pada anak tangga konsultasi ditandai dengan adanya komunikasi dua arah antara pemerintah dan Masyarakat dalam bentuk dialog dan Masyarakat memiliki hak untuk didengar pendapatnya meskipun belum mampu berpengaruh signifikan pada pengambilan keputusan. Adapun anak tangga ketiga partisipasi Masyarakat pada musrenbang nagari Koto Taratak yaitu pada anak tangga penentrman yang memiliki makna bahwa Masyarakat dilibatkan lebih jauh dalam pengambilan keputusan, namun pasrah pada putusan pemerintah. Artinya Masyarakat berhenti pada partisipasi pemberian usulan dan gagasan sedangkan keputusan akhir tetap diserahkan pada pemerintah.

Masyarakat belum bisa mencapai tingkatan *citizen control* (kekuasaan Masyarakat) dilihat pada partisipasi Masyarakat dalam pengambilan keputusan pada musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari Koto Taratak.

Adapun bentuk partisipasi Masyarakat dalam pengambilan keputusan pada musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari Koto Taratak dilihat berdasarkan teori partisipasi yang dikemukakan oleh (Cohen & Uphoff, 1980) bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah penentuan alternatif masyarakat yang berhubungan dengan pemberian ide, usulan, atau pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh kesepakatan yang menyangkut kepentingan bersama. Selain itu Cohen & Uphoff dalam (Dwiningrum, 2011) menyatakan bentuk partisipasi Masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat berupa kehadiran rapat, sumbangan ide, diskusi, dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Kehadiran rapat, partisipasi Masyarakat dalam menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari Koto Taratak masih rendah yaitu kurang dari 50%. Selain itu, kehadiran Perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki.
2. Sumbangan ide, partisipasi Masyarakat dalam memberikan saran, masukan, dan usulan dalam forum musrenbang Koto Taratak masih rendah. Dari 34 masyarakat yang hadir hanya 7 orang yang berpartisipasi secara aktif sedangkan sisanya sebagai peserta pasif.
3. Diskusi, partisipasi Masyarakat Koto Taratak dalam diskusi musrenbang juga masih rendah karena perundingan terkesan kaku (pasif) dan tidak ada *feedback* dari Masyarakat. Masyarakat yang aktif menanggapi diskusi hanya masyarakat yang memberi usulan saja
4. Tanggapan/penolakan, pada musrenbang Nagari Koto Taratak tahun 2024 tidak ditemukan adanya Masyarakat yang memberikan tanggapan atau penolakan selama rapat. Seluruh usulan diterima dengan baik, Masyarakat mempercayakan prioritas usulan kepada pemerintah nagari.

Rendahnya tingkat partisipasi Masyarakat dalam pengambilan keputusan pada musrenbang Koto Taratak tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dijelaskan sebagai berikut :

## **A. Faktor Pendukung**

### **a. Harapan dan Keinginan dari Masyarakat**

Partisipasi Masyarakat dalam pengambilan keputusan pada musyawarah perencanaan pembangunan dapat dipengaruhi oleh adanya harapan dan keinginan

dalam diri Masyarakat. Harapan dan keinginan merupakan hasrat yang berasal dari dalam diri Masyarakat terhadap perubahan yang dibutuhkan menuju kearah yang lebih baik. Masyarakat mengharapkan kemajuan lingkungan sehingga tanpa sadar hal tersebut menuntunnya untuk berpartisipasi dan memberikan usulan dan pemikiran dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, Masyarakat cenderung naik semangat partisipasinya ketika memiliki keinginan terhadap sesuatu. Misalnya dalam forum musyawarah koto taratak, beberapa informan mengatakan bahwa keterlibatannya dalam musrenbang merupakan bentuk keberanian yang muncul karena adanya harapan dan keinginan. Jika bukan kita yang mengusulkan maka tak akan ada pihak lain yang lebih tau kondisinya dibanding diri kita sendiri. Contohnya yang memberikan usulan mengenai perbaikan jalan SDN 33 Koto Taratak adalah unsur perwakilan dari sekolahnya, kemudian usulan mengenai pembangunan balai pemuda dan pelatihan pemuda juga merupakan usulan dari unsur pemuda. Hal ini menunjukkan bahwa harapan dan keinginan mempengaruhi partisipasi Masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan.

Melalui musyawarah perencanaan pembangunan Masyarakat dapat menyampaikan harapan dan keinginannya sambil memberikan gambaran yang jelas terkait persoalan yang dialami. Hasil penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Abdillah, 2021) pada penelitiannya dijelaskan bahwa setiap masyarakat memiliki harapan agar lingkungannya semakin maju sehingga dengan begitu Masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan dan menentukan semua hal yang dibutuhkan Masyarakat. Hal ini juga ditemui di Nagari Koto Taratak dimana Masyarakat menjadi lebih berani untuk menyampaikan pendapat karena adanya beberapa usulan yang hendak disampaikan pada pemerintah. Hal ini tentu saja menyangkut tentang kepentingan masing—masing kelompok.

Masyarakat mempercayai bahwa setiap usulan yang diberikan pada forum pasti akan direalisasikan oleh pemerintah nagari. Hal ini disampaikan langsung oleh satu Masyarakat peserta musrenbang yaitu ibuk yuli. Beliau mengatakan bahwa meskipun lambat tapi pasti akan direalisasikan oleh pemerintah, hanya menunggu waktu dan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaannya. Hal ini menandakan bahwa Masyarakat memiliki tingkat kepercayaan tinggi kepada Masyarakat sehingga harapan dan keinginan Masyarakat selalu menjadi alasan yang mendukung mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada musyawarah perencanaan pembangunan.

## **b. Kesadaran Diri Masyarakat**

Faktor kesadaran diri dapat mempengaruhi partisipasi Masyarakat dalam pengambilan keputusan pada musyawarah perencanaan pembangunan. Kesadaran diri ini lahir karena adanya dorongan dari dalam diri Masyarakat berupa tanggung jawab atau rasa segan terhadap pemerintah nagari dan dorongan dari hati nurani tanpa ada paksaan dari pihak lain. Menurut Sari dalam (Darin et al., 2022) faktor kesadaran atau kemauan merupakan keikutsertaan Masyarakat dalam sebuah kegiatan pembangunan yang timbul atas dorongan dari dalam diri sendiri. Menurut (Muluk & M.R Khoirul, 2007) kesadaran berpartisipasi merupakan kemauan Masyarakat untuk berkorban dalam menyediakan waktu, tenaga, pikiran, maupun materi untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Konsep ini menunjukkan bahwa faktor kesadaran diri adalah bentuk kesukarelaan Masyarakat dalam meluangkan waktu dan tenaganya dalam mendukung proses perencanaan pembangunan.

Menurut (Muluk & M.R Khoirul, 2007) faktor kesadaran Masyarakat untuk berpartisipasi dapat timbul dari adanya rasa kepentingan dari masyarakat serta proses Pendidikan politik yang pernah dialami. Hal ini berarti bahwa kesadaran diri juga berasal dari adanya kepentingan bagi Masyarakat, maksudnya ketika dampak pembangunan dapat membawa pengaruh bagi kehidupan Masyarakat maka timbul kesadaran dalam dirinya untuk berpartisipasi dan memperjuangkan kepentingan tersebut. Sedangkan dari segi Pendidikan politik, kesadaran diri ini muncul karena adanya peningkatan pemahaman Masyarakat dalam menyadari arti keterlibatan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat berpengaruh besar dalam pelaksanaan pembangunan khususnya dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat peserta musrenbang di Nagari Koto Taratak diketahui bahwa faktor kesadaran diri menjadi salah satu hal yang mendukung partisipasi Masyarakat dalam pengambilan keputusan pada musrenbang. Mereka menyebutkan bahwa kehadiran mereka dalam rapat merupakan bentuk kesadaran diri sebagai Masyarakat yang telah diberi kepercayaan untuk mewakili Masyarakat lainnya sehingga sangat memalukan jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Penemuan ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Darin et al., 2022) dan penelitian (Rafi'atul Hadawiya et al., 2021) yang mengatakan bahwa kesadaran diri masyarakat menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat.

**c. Dukungan Pemerintah Nagari**

Dukungan dari pemerintah nagari merupakan bentuk motivasi yang diberikan pemerintah pada Masyarakat untuk menggugah kesadaran diri dan kepentingan Masyarakat agar memanfaatkan forum musrenbang sebagai tempat untuk menyampaikan seluruh kebutuhan dan keluhan Masyarakat mengenai perencanaan pembangunan. Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah Nagari Koto Taratak memberikan dukungan kepada Masyarakat agar memberikan kontribusi dalam perencanaan pembangunan khususnya bagi Masyarakat yang dipercaya sebagai perwakilan Masyarakat luas. Dukungan tersebut berupa kesiapan penyebaran undangan kepada Masyarakat terkait serta memberikan motivasi pada Masyarakat saat forum musrenbang berlangsung. Pemberian dukungan ini diharapkan dapat memberikan kepercayaan diri pada Masyarakat untuk berani mengemukakan gagasan masing-masing. Sesuai dengan pendapat (Bahua, 2018) tanpa adanya peran dan pengendalian optimal dari pemerintah, maka pembangunan tidak dapat berjalan dengan teratur hingga menimbulkan persoalan baru.

Pemerintah dan Masyarakat memiliki perannya masing-masing dalam pembangunan sehingga koordinasi dan keharmonisan keduanya harus saling terjaga satu sama lainnya. Adanya dukungan dari pemerintah dapat meningkatkan kemauan, kesadaran dan semangat Masyarakat untuk terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan sehingga Masyarakat perlahan akan mulai menyadari pentingnya partisipasi Masyarakat dalam pengambilan keputusan pada musyawarah perencanaan pembangunan yang menentukan arah, pedoman dan pelaksanaan pembangunan.

Bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah Nagari Koto Taratak dalam upaya meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan adalah dengan memberikan ruang bebas kepada Masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran maupun kritiknya pada pemerintah nagari mengenai evaluasi pembangunan maupun usulan pembangunan yang tidak terbatas pada forum musrenbang saja melainkan juga melalui diskusi kecil ketika sama-sama duduk di warung, hal semacam ini dinamakan "*ota lapau*" jika ada staff nagari atau perwakilan BAMUS yang mendengar hasil diskusi tersebut maka sama-sama akan diusulkan pada forum resmi saat musrenbang berlangsung. Selain itu, pemerintah nagari juga berupaya memberikan pemahaman kepada peserta musrenbang mengenai pentingnya penyampaian usulan dan memberikan keyakinan pada Masyarakat agar tidak takut untuk menyampaikan argument secara lantang didalam forum.

## **B. Faktor Penghambat**

### **a. Pekerjaan atau Ekonomi**

Perekonomian seringkali menjadi faktor yang menghambat partisipasi Masyarakat dalam segala aspek. Kepentingan Masyarakat untuk bekerja dan mencari nafkah menjadi persoalan pelik yang tidak bisa ditinggalkan oleh Masyarakat. Maksudnya Masyarakat tidak bisa meninggalkan pekerjaannya demi menghadiri rapat karena pemasukan menjadi prioritas Masyarakat yang bergantung pada pekerjaan harian. Mayoritas Masyarakat Nagari Koto Taratak tidak memiliki penghasilan tetap bulanan sehingga mereka harus bekerja per hari untuk memperoleh uang, jika tidak masuk kerja maka tidak dapat penghasilan dalam satu hari tersebut. Hal inilah yang membuat kebanyakan Masyarakat khususnya para bapak-bapak enggan meluangkan waktu untuk mengikuti musrenbang.

Ekonomi Masyarakat di Nagari Koto Taratak Sebagian besar bergantung hasil panen dan laut. Hal ini menyebabkan Sebagian besar Masyarakat berprofesi sebagai petani dan juga nelayan. Tidak memiliki penghasilan tetap dan bergantung pada gaji harian membuat Masyarakat enggan untuk memprioritaskan musrenbang daripada bekerja. Bapak Syafridal selaku wakil ketua BAMUS Nagari Koto Taratak mengatakan bahwa alasan Masyarakat tidak hadir pada musrenbang adalah karena harus pergi bekerja. Hal ini juga dibuktikan dengan wawancara penulis bersama beberapa Masyarakat lainnya. Faktor ekonomi atau pekerjaan ini juga ditemukan oleh beberapa peneliti lain diantaranya (Abdillah, 2021; Darin et al., 2022; Fitri & Magriasti, 2020; Rafi'atul Hadawiya et al., 2021) keempat penelitian tersebut menyebutkan bahwa kendala Masyarakat tidak dapat hadir pada musrenbang adalah karena adanya kewajiban Masyarakat untuk bekerja dan mencari nafkah.

### **b. Tingkat Pendidikan yang rendah**

Tingkat Pendidikan Masyarakat juga mempengaruhi partisipasi dalam pengambilan keputusan pada musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari Koto Taratak. Masyarakat yang tamatan SMA lebih memahami perannya dalam musrenbang dan mampu menyampaikan pendapat didalam forum sedangkan Masyarakat yang tingkat Pendidikan terakhirnya lebih rendah cenderung pasif dan tidak banyak yang memiliki keberanian untuk berpendapat ditengah forum. Hal ini ditemukan pada saat pelaksanaan musrenbang dimana Masyarakat tamatan SMA memiliki pola pikir yang lebih maju dan kreatif sedangkan yang lainnya cenderung pasif dan merasa minder pada pengetahuannya sehingga kurang percaya diri untuk aktif berpendapat.

Tingkat Pendidikan Masyarakat peserta musrenbang di Nagari Koto Taratak rata-rata tamatan SMP dan SMA, hal ini dikonfirmasi langsung oleh sekretaris nagari koto taratak yaitu bapak Bahrul yang menyebutkan bahwa undangan musrenbang diberikan pada perwakilan Masyarakat yang memiliki pemahaman tentang musrenbang dan Sebagian besar adalah lulusan SMA. Menurutnya Masyarakat lulusan SMA lebih memiliki kepercayaan diri untuk berpendapat karena pemahaman yang dimiliki. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan Masyarakat terhadap musrenbang dapat menghambat keterlibatan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan karena kurangnya kesadaran yang datang dari minimnya pemahaman Masyarakat. Artinya ketika Masyarakat memahami makna penting partisipasi dalam musrenbang maka hasrat dan kesadaran berpartisipasi akan muncul dengan sendirinya dalam diri Masyarakat begitupun sebaliknya.

### **Kesimpulan**

Tingkat partisipasi Masyarakat berada pada anak tangga kedua yaitu tokenism yang menunjukkan adanya tanda partisipasi yang masih lemah karena Masyarakat belum mampu mempertahankan usulannya dan memegang kendali atas pengambilan keputusan. Adapun faktor yang mempengaruhi partisipasi Masyarakat dalam pengambilan keputusan pada musyawarah perencanaan pembangunan terdiri atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung partisipasi Masyarakat meliputi : (a) harapan dan keinginan dari Masyarakat, maksudnya partisipasi muncul karena adanya harapan yang ingin disampaikan Masyarakat kepada pemerintah, (b) kesadaran diri Masyarakat, kesadaran diri ini lahir atas dorongan hati nurani berupa kesukarelaan Masyarakat untuk meluangkan waktu mengikuti musrenbang, dan (c) dukungan dari pemerintah nagari, dukungan ini dapat berupa pemberian undangan, pemberian motivasi dan pemahaman. Faktor penghambat partisipasi Masyarakat yaitu : (a) ekonomi atau pekerjaan, mayoritas Masyarakat Koto Taratak tidak memiliki penghasilan tetap sehingga bergantung pada upah harian, hal ini membuat Masyarakat tidak bersedia meninggalkan pekerjaannya demi menghadiri musrenbang, (b) tingkat Pendidikan yang rendah, Masyarakat lulusan SMA lebih percaya diri untuk bersuara dalam forum sedangkan Masyarakat yang tingkat pendidikannya lebih rendah cenderung pasif karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki.

## Daftar Pustaka

- Abdillah, L. I. P. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Desa (Studi di Desa Rungau Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan). *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 9(2), 67–74.
- Bahua, M. I. (2018). Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat. In *Gorontalo: Ideas Publishing*. Ideas Publishing.
- BPS. (2023). *Kecamatan Sutera Dalam Angka*. BPS Kabupaten Pesisir Selatan.
- Cohen, J., & Uphoff, N. (1980). *Participation ' s place in rural development : Seeking clarity through specificity ' , World Development , 8 : 213-235 .*
- Darin, Moonti, U., & Dai, S. I. S. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa. *JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN BISNIS*, 15(1).
- Dwiningrum, S. I. A. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan* (Widada (ed.); 1st ed.). Pustaka Pelajar. <https://library.fis.uny.ac.id/digital/fisbook/34173cb38f07f89ddbcb2ac9128303f/>
- Fitri, A. L., & Magriasti, L. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(3), 109–120. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i3.73>
- Handini, S., Sukesu, & Astuti, H. K. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Desa. In *MSC* (Vol. 11, Issue 1). <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Muluk, & M.R Khoirul. (2007). Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintah Daerah. In *Malang: Lembaga Penerbitan dan Dokumentasi FIAUnibraw bersama Bayumedia Publishing*. (2nd ed.). FIA- UNBRAU & Bayumedia publishing. [https://www.academia.edu/38426772/Menggugat\\_Partisipasi\\_Publik\\_dalam\\_Pemerintahan\\_Daerah](https://www.academia.edu/38426772/Menggugat_Partisipasi_Publik_dalam_Pemerintahan_Daerah)

- Poespito Hadi, W., & Ega Tree, F. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) DI Desa. *Open Journal Systems*, 18(1978), 43–50.
- Rafi'atul Hadawiya, Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 192–200. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749>
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Www.Peraturan.Bpk.Go.Id*, 73. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/199685/permendesa-pdtt-no-21-tahun-2020>
- Setiawan, A. (2022). *Pemerintahan Desa (Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan Desa)*. DEEPUBLISH.
- Suaib. (2023). Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. In *Adab*. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Tjilen, A. P., & Moento, P. A. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Kampung Wapeko, Distrik Animha, Kabupaten Merauke. *NeoRespublika : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 363–377.
- Waris, F. R. F. M. wasil; S. J. L. H. S. W. E. M. J. I. M. N. H. A. M. K. A. R. N. N. L. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue March). <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (4th ed.). KENCANA.